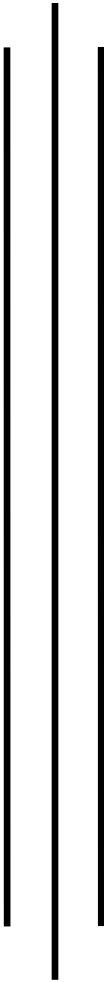


LAMPIRAN XXIII : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2027





PEMERINTAH
KOTA BATAM



DUKSTAR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027

DUKCAPIL
PRIMA

PROFESIONAL
RESPONSIF
INOVATIF
MELAYANI
AKUNTABEL



IKD
IDENTITAS
KEPENDUDUKAN
DIGITAL

IS

INDONESIA'S
FUTURE

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2027.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang urusan Administrasi Kependudukan, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2027.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, 20 Juli 2026

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam



SRI MIRANTHY ADISTHY, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I / IV-b
NIP. 198509232003122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....2

DAFTAR ISI.....3

DAFTAR TABEL.....5

DAFTAR GAMBAR6

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang.....1

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah1

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah1

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya2

1.2 Dasar Hukum.....3

1.3 Maksud dan Tujuan6

1.4 Sistematika Penulisan6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..8

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK
Tahun 2025.....8

2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-202511

2.3 Urusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027.....11

2.3.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 202511

2.3.2 Permasalahan25

2.3.3 Kondisi Lingkungan Dinamis27

2.3.4 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....28

2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....29

2.5 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan
Kepada Masyarakat.....29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....36

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah36

3.2 Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra
Perangkat Daerah.....37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...43

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 202743

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Pencapaian Program
Prioritas Daerah, Kontirbusi terhadap Pencapaian Nasional,
Pencapaian SPM (Bagi Bidang Urusan Terkait) dan Tematik
Lainnya sesuai dengan Bidang Urusan.60

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....66

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 202766

5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 202766

BAB VI PENUTUP.....68

6.1 Catatan Penting.....68

6.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan68

6.3 Rencana Tindak Lanjut69

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Urusan Berupa IKU Tahun 20259

Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK Tahun 2025.....10

Tabel 2. 3 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025.....11

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025.....15

Tabel 2. 5 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Rokumen Renja PD
Tahun 202729

Tabel 2. 6 Pengelompokan Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2027.....30

Tabel 3. 1 Target Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam Tahun 202737

Tabel 3. 2 Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau,
Prioritas Kota Batam dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun
202741

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2027.....44

Tabel 4. 2 Dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Prioritas Nasional 60

Tabel 4. 3 Dukungan Program Rencana Kerja terhadap Prioritas Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 202760

Tabel 4. 4 Dukungan Program Rencana Kerja terhadap Prioritas Kota Batam
Tahun 202761

Tabel 4. 5 Dukungan Program Rencana Kerja terhadap Optimalisasi
Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan62

Tabel 4. 6 Dukungan Program Rencana Kerja terhadap Pengarustamaan
Gender Tahun 202764

Tabel 5. 1 Indikator Kinerja Utama Tahun 202766

Tabel 5. 2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 202767

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renja2

Gambar 1. 2 Tahapan Penyusunan Renja2

Gambar 1. 3 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

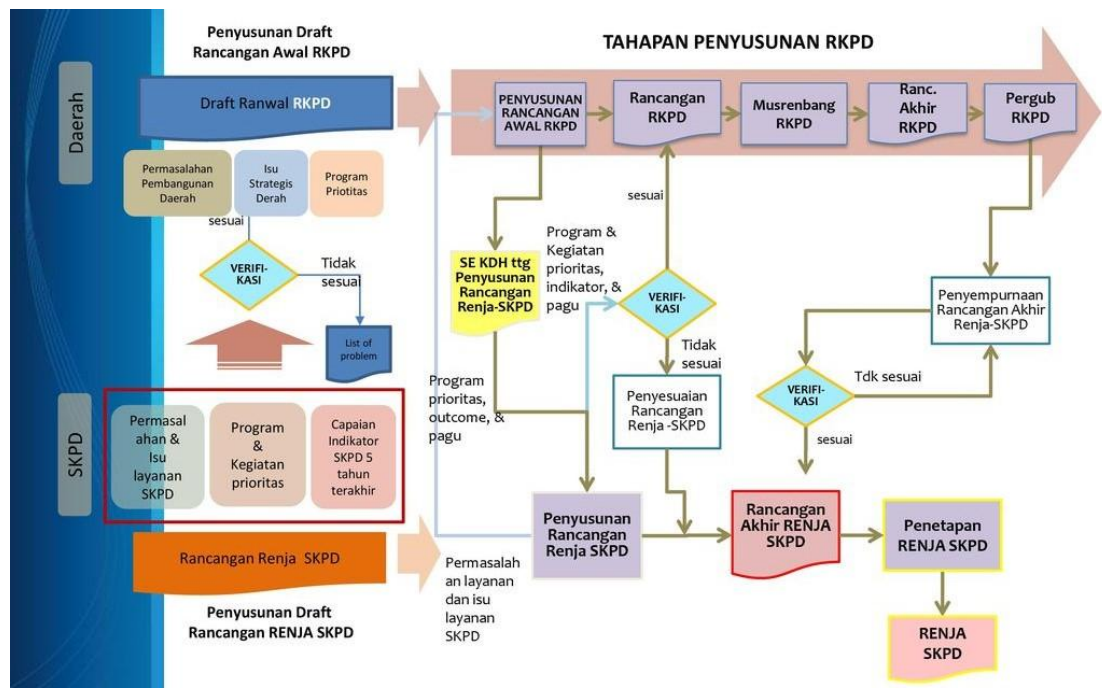
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

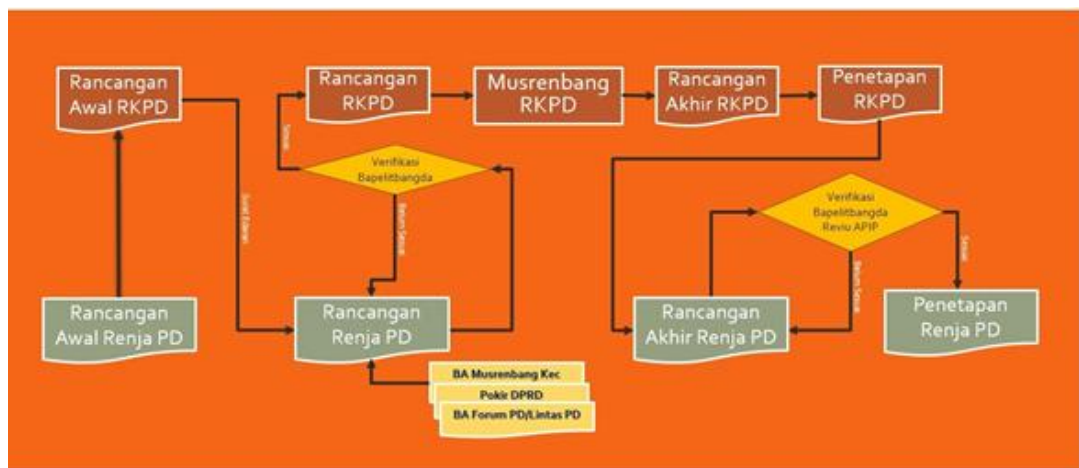
- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renja



Gambar 1. 2 Tahapan Penyusunan Renja

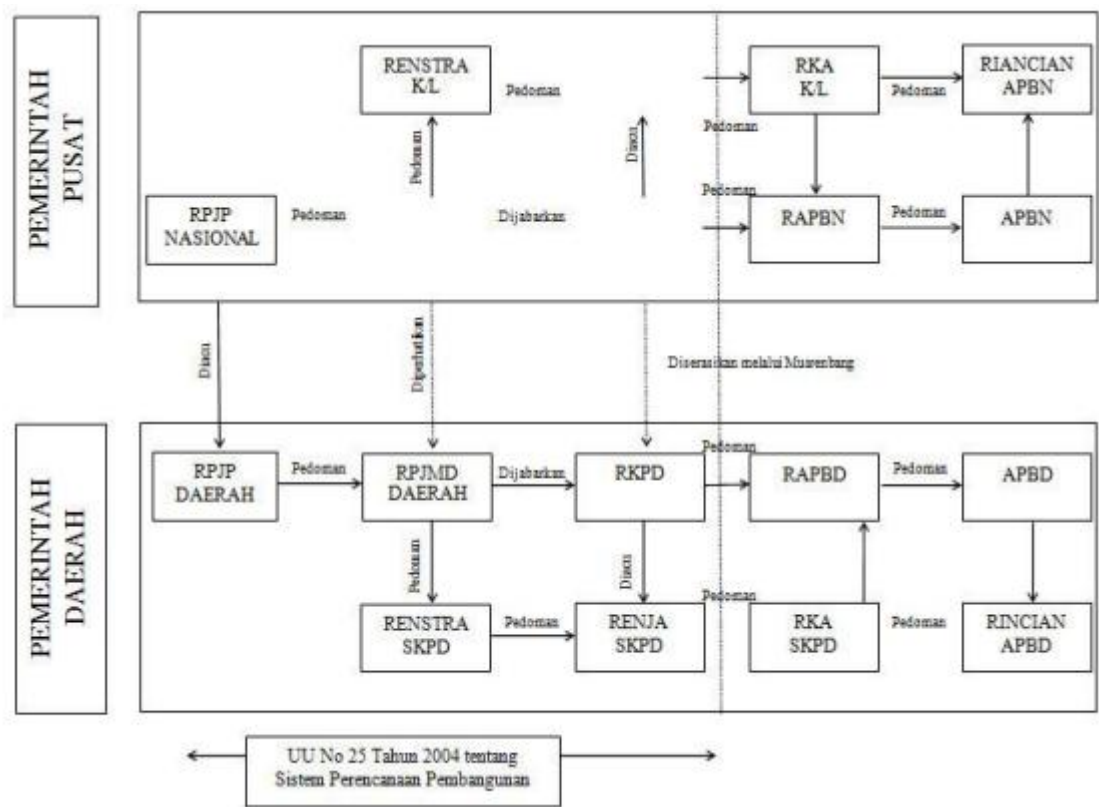


1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1. 3 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Dasar Hukum

Adapun yang menjadi Dasar hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, serta melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
16. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 177);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP-el (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tahun 2016 Nomor 80);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8-1256 DUKCAPIL Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029;
 28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
 29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
 30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 139);
 31. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 14 Tahun 2024 tentang Susunan, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1354);
 32. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1635);
 33. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1718).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan 2027, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun Anggaran 2027.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

1. Latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menjelaskan gambaran bidang urusan yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait).
3. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD.
5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

(target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).

2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025

Secara akumulatif, kinerja pelayanan publik dan tata kelola administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 menunjukkan tren yang sangat progresif. Seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta sub-indikator pendukungnya berhasil direalisasikan dengan status capaian Sangat Tinggi (ST). Kondisi ini merepresentasikan keberhasilan instansi dalam mengimplementasikan inovasi pelayanan dan menjawab ekspektasi masyarakat di tengah tingginya dinamika kependudukan Kota Batam.

Pada indikator makro, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mencatatkan realisasi sebesar 3,72 (dalam skala indeks) dari target 3,70. Capaian dengan persentase 100,54% ini merupakan muara dari kualitas layanan administrasi yang semakin responsif, transparan, dan terukur. Keberhasilan pencapaian indeks makro ini ditopang secara solid oleh tiga sub-indikator operasional berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sub-indikator ini mencatatkan poin realisasi sebesar 93,10, melampaui target tahun berjalan yang ditetapkan sebesar 92,13 (capaian 101,05%). Menariknya, realisasi pada tahun 2025 ini bahkan telah melampaui target akhir periode RPJMD tahun 2029 yang dipatok pada angka 92,22. Hal ini menunjukkan efektivitas instrumen pengukuran kepuasan dan perbaikan layanan *front-office*, yang ke depannya menuntut instansi untuk konsisten mempertahankan standar pelayanan prima tersebut.
2. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tingkat kepemilikan dokumen masyarakat terealisasi sebesar 78,06% dari target 78,39%. Meskipun terdapat deviasi minor dari angka target absolut, tingkat capaian kinerja yang menyentuh 99,58% tetap mengukuhkan indikator ini pada status Sangat Tinggi (ST). Pemenuhan dokumen yang hampir mencapai target absolut ini tidak terlepas dari masifnya gerakan aksi pelayanan *on location* serta strategi jemput bola yang menyasar berbagai segmen masyarakat, mulai dari usia sekolah hingga kelompok rentan. Upaya ini akan terus diakselerasi guna mencapai target akhir periode sebesar 83,61% pada tahun 2029.
3. Persentase Pemangku Kepentingan Yang Aktif Memanfaatkan Dokumen Dan Informasi Kependudukan Indikator ini menjadi area dengan lonjakan capaian paling signifikan, yakni menyentuh tingkat capaian 119,40%. Realisasi pemanfaatan data berada di angka 70,45%, jauh meninggalkan target tahunan yang direncanakan sebesar 59%. Mengingat *baseline* tahun 2024 menggunakan formula perhitungan yang berbeda dari target awal Renstra 2025–2029, pencapaian luar biasa di tahun 2025 ini memberikan pijakan fundamental yang sangat kuat. Tingginya angka ini membuktikan bahwa basis data kependudukan Disdukcapil semakin dipercaya dan terintegrasi secara lintas sektoral, memberikan optimisme tinggi untuk mencapai target 93% di penghujung tahun 2029.

Keberhasilan mempertahankan predikat Sangat Tinggi (ST) pada seluruh indikator kinerja tersebut menegaskan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam mewujudkan ekosistem pelayanan publik yang inklusif, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Urusan Berupa IKU Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Indeks	3,68	3,70	3,72	100,54	ST	3,77
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Poin	92,10	92,13	93,10	101,05	ST	92,22
1.2	Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase	76,95	78,39	78,06	99,58	ST	83,61
1.3	Persentase Pemangku Kepentingan Yang Aktif Memanfaatkan Dokumen Dan Informasi Kependudukan	Persentase	100*	59	70,45	119,40	ST	93
Catatan: *) perhitungan indikator kinerja awal berbeda formula perhitungan dengan target awal RENSTRA 2025-2029.								

Sumber: Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pada evaluasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025, kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam secara agregat menunjukkan dominasi capaian yang sangat positif, meskipun menyisakan satu catatan strategis pada aspek digitalisasi. Dari tujuh rumusan IKK yang dievaluasi, enam di antaranya berhasil menorehkan predikat Sangat Tinggi (ST), mengonfirmasi efektivitas tata kelola pelayanan dokumen kependudukan dasar.

Kinerja paripurna dengan realisasi absolut 100% tercatat pada pemenuhan layanan pelaporan masyarakat, yakni Persentase Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan sehingga secara tidak langsung seluruh pelaporan akan terhitung sebagai sebuah kinerja pada tahun anggaran berjalan. Target ini konsisten terjaga mutlak (100%) dari *baseline* 2024 hingga target akhir RPJMD 2029, membuktikan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian dokumen di loket pelayanan telah berjalan dengan sangat responsif dan tanpa celah. Kondisi absolut yang sama juga diraih pada penyusunan Jumlah Data

Profil Kependudukan, yang tuntas direalisasikan 100% sebagai basis data pembangunan daerah.

Tren kinerja yang melampaui ekspektasi terlihat jelas pada pemenuhan identitas sipil anak. Indikator Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan menembus angka realisasi 98,20% dari target 97,40% (capaian 100,82%). Pencapaian ini tergolong istimewa mengingat angka tersebut telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2029 yang diproyeksikan sebesar 97,90%. Selaras dengan hal tersebut, indikator Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) juga berhasil direalisasikan sebesar 63,56% dari target 63,00% (capaian 100,88%). Keberhasilan pada dua indikator ini tidak terlepas dari agresivitas inovasi layanan jemput bola terintegrasi, seperti paket layanan *3-in-1* dan kolaborasi perekaman di sekolah maupun permukiman warga.

Di sisi lain, evaluasi ini juga memotret tantangan nyata pada indikator Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Indikator transformasi digital ini baru merealisasikan capaian sebesar 6,04% dari target 9,00%, sehingga persentase kinerja tertahan pada angka 67,11% dengan status Sangat Rendah (SR). Kesenjangan ini menjadi anomali di tengah tingginya capaian layanan fisik. Hal ini mengisyaratkan bahwa penetrasi adopsi IKD masih berbenturan dengan dinamika di lapangan, seperti tingkat literasi digital, kompatibilitas gawai (*smartphone*) masyarakat, serta kesadaran masyarakat akan urgensi identitas digital.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi IKK Tahun 2025 mengamanatkan Disdukcapil Kota Batam untuk terus mempertahankan standar pelayanan prima dan agresivitas pencetakan dokumen fisik. Namun, untuk tahun perencanaan berikutnya, instansi dituntut untuk merumuskan langkah akselerasi yang lebih radikal—seperti optimalisasi perluasan program inovasi *Safari IKD* ke sektor swasta dan kawasan industri—guna mengejar ketertinggalan capaian IKD demi mencapai target 20% pada akhir periode 2029.

Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase	100	100	100	100	ST	100
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase	100	100	100	100	ST	100
3	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase	100	100	100	100	ST	100
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	Persentase	97,23	97,40	98,20	100,82	ST	97,90

5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	58,05	63,00	63.56	100,88	ST	83,00
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	Persentase	0	100	100	100	ST	100
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persentase	5,46	9,00	6,04	67,11	SR	20

Sumber: Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029

2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Dalam rangka pemaparan Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023–2025, perlu disampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal, indikator dan target capaian SPM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak ada atau nihil. Evaluasi kinerja dinas selanjutnya difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Tabel 2. 3 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi		
			2023	2024	2025
		NIHIL			

Sumber : RKPD Tahun 2027

2.3 Urusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027

2.3.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2025 per Desember 2025 sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja, secara akumulatif sebagian besar program, kegiatan, dan sub-kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 telah mencapai atau melampaui target kinerja hasil/keluaran yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat deviasi negatif pada beberapa sub-kegiatan penunjang internal yang belum mencapai target 100%, seperti sub-kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai (program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota) karena terdapat refocusing anggaran untuk efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga kegiatan pelatihan diarahakan dalam metode daring.
 Sementara itu, terkait kegiatan yang tidak memiliki target/kinerja spesifik pada tahun berjalan seperti Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota) serta Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) hal tersebut terjadi karena adanya transisi pelaksanaan yang sebelumnya diakomodasi oleh program lain sebelum ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025-2029. Tindak lanjut ke depan akan difokuskan pada sinkronisasi program pasca-penetapan Renstra baru.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Nilai SAKIP PD dari target fisik yaitu 72.87 mencapai 72.87, serta indikator Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dari target 96 mencapai 96,11;
 - b. Program Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari target 99.44% mencapai 99.58%. Program utama (*core business*) Disdukcapil ini menunjukkan performa sangat memuaskan. Tingkat pencetakan dokumen pencatatan sipil melampaui target (dari 40000 menjadi 42274 dokumen). Hal ini juga didukung penuh oleh capaian 100% pada pelaksanaan sosialisasi pencatatan sipil.
 - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja persentase dokumen dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan dari target 44% mencapai 44%;
 - d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indikator persentase cakupan pengelolaan profil kependudukan yang dimanfaatkan dari target 73% mencapai 100%.
3. Realisasi program/kegiatan yang belum mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari target 57,33% mencapai 56.53%, walaupun demikian pencapaian Program utama (*core business*) Disdukcapil ini menunjukkan performa sangat memuaskan. Tingkat pencetakan dokumen pendaftaran penduduk melampaui target (dari 157.500 menjadi 159.001 dokumen). Hal ini juga didukung penuh oleh capaian 100% pada pendataan penduduk non-permanen dan pelaksanaan sosialisasi pendaftaran penduduk.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

- a. Penghambat pada Program Penunjang dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan lebih dominan terhadap fokus SDM dan sumber daya (anggaran) Disdukcapil Kota Batam tampaknya terpusat pada pelayanan *front-office* dan penyelesaian antrian dokumen masyarakat (efek prioritas layanan publik). Hal ini mengorbankan program *back-office* seperti Bimbingan Teknis, pengawasan SIAK, dan Diklat Pegawai yang terpaksa ditunda (refocusing) atau tidak terserap karena tenaga teknis tidak bisa meninggalkan pos layanan selain dari alasan dalam refocusing anggaran karena efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden.
 - b. Pendukung Program Pencatatan Sipil Memenuhi/Melebihi Target: Capaian luar biasa pada program inti ini didorong oleh karakteristik Kota Batam sebagai kota industri dengan mobilitas/migrasi penduduk yang masif, memicu tingginya *demand* (permintaan) pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Hal ini diimbangi dengan responsivitas aparatur melalui strategi layanan jemput bola, penerapan inovasi pelayanan dan kerja sama antar lintas sektoral, serta optimalisasi anggaran pengadaan alat untuk memperkuat loket layanan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
- a. Akselerasi Pencapaian Target IKU Pelayanan Publik
Dari sisi positif, terjadi akselerasi pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pelayanan publik, yang ditandai dengan realisasi penerbitan dokumen pendaftaran penduduk yang melampaui ekspektasi hingga mencapai 159.001 dokumen. Capaian luar biasa pada tahun pertama pelaksanaan Renstra ini memberikan landasan awal (*head-start*) yang sangat solid bagi Disdukcapil. Dengan terlampauinya target kuantitas fisik di awal periode, arah kebijakan dan fokus sasaran Renstra untuk tahun 2026 hingga 2029 dapat dieskalasi menuju peningkatan kualitas layanan, seperti percepatan adopsi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan integrasi data kependudukan secara holistik.
 - b. Potensi Risiko Stagnasi Kapasitas SDM dan Kelembagaan
Di balik capaian pelayanan publik yang tinggi, evaluasi ini juga memunculkan implikasi risiko terkait potensi stagnasi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan. Tidak terealisasinya program pendidikan dan pelatihan pegawai secara total, serta belum optimalnya capaian beberapa kegiatan dukungan administratif, menjadi peringatan bagi instansi. Renstra Disdukcapil tidak hanya bertumpu pada indikator *front-office* atau pelayanan langsung, tetapi juga mensyaratkan penguatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi. Apabila pengembangan kompetensi ASN terus dikesampingkan akibat tingginya beban pelayanan harian, akan terjadi kesenjangan (*gap*) kompetensi yang berisiko besar menghambat terwujudnya target inovasi digital dan profesionalisme aparatur pada fase pertengahan hingga akhir Renstra.
 - c. Urgensi Koreksi *Baseline* Perencanaan dan Penganggaran
Dari aspek perencanaan dan penganggaran, deviasi yang terjadi antara penetapan target awal dan eksekusi lapangan mengindikasikan adanya urgensi untuk melakukan koreksi *baseline* target di dalam Renstra. Kondisi di mana realisasi pemeliharaan peralatan jauh lebih efisien dari yang direncanakan, sementara pengadaan barang justru melampaui volume awal, menunjukkan bahwa asumsi awal perencanaan perlu dikalibrasi ulang. Hal ini berimplikasi pada keharusan Disdukcapil untuk melaksanakan tinjauan paruh waktu (*mid-term review*) terhadap

dokumen Renstra. Tinjauan ini krusial untuk memastikan penetapan target capaian selanjutnya lebih realistis, rasional, dan proporsional, guna menghindari target yang terlalu rendah (*under-target*) maupun alokasi anggaran yang tidak terserap optimal (*idle*).

- d. Pentingnya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan (Transisi Renstra) Implikasi yang tidak kalah penting berkaitan dengan sinkronisasi dokumen perencanaan akibat masa transisi penyusunan Renstra baru. Temuan adanya beberapa program pendukung yang belum memuat target kinerja spesifik pada awal tahun menegaskan perlunya sinkronisasi dan penjabaran (*cascading*) secara lebih presisi. Ke depannya, seluruh nomenklatur program dan kegiatan dalam Renstra 2025-2029 harus terdistribusi dengan jelas ke dalam Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Renja Tahun 2026 lengkap dengan target kuantitatifnya. Secara keseluruhan, untuk menjaga agar pencapaian target Renstra tetap *on-track*, Disdukcapil Kota Batam harus menjadikan capaian 2025 sebagai pijakan strategis; di mana standar target untuk layanan rutin yang sudah ekselen perlu dinaikkan (*raise the bar*), sembari memastikan alokasi kegiatan peningkatan kapasitas internal dikawal ketat realisasinya di tahun mendatang.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan : Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
	Bidang Urusan : Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil									
2.12.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP PD	80,61 Angka	-	72,87 Angka	72,87	100	73.61 Angka	-	-
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 Poin	-	96 Poin	96,11	100,11	97 Poin		
2.12.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.01.2.01.0001	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	3 Dokumen	100	100 %	2 Dokumen	-	-
2.12.01.2.01.0007	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	-	2 Laporan	100	100 %	3 Laporan	-	-
2.12.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
2.12.01.2.02.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/Bulan	-	105 Orang/Bulan	105 Orang/Bulan	100 %	105 Orang/Bulan	-	-
2.12.01.2.02.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	13 Dokumen	-	-
2.12.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
2.12.01.2.05.0002	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	0 Paket	0 Paket	0	0 Paket	-	-
2.12.01.2.05.0009	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	-	4 Orang	0 Orang	0	5 Orang	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
2.12.01.2.06.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	-	-
2.12.01.2.06.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100 %	4 Paket	-	-
2.12.01.2.06.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	-	-
2.12.01.2.06.0005	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	-	-
2.12.01.2.06.0009	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	-	-
2.12.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.01.2.07.0005	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	-	32 Unit	32 Unit	100 %	24 Unit	-	-
2.12.01.2.07.0006	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	-	14 Unit	91 Unit	100 %	32 Unit	-	-
2.12.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
2.12.01.2.08.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	-	-
2.12.01.2.08.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	-	-
2.12.01.2.08.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	100 %	2 Laporan	-	-
2.12.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.01.2.09.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	-	-
2.12.01.2.09.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100 %	5 Unit	-	-
2.12.01.2.09.0006	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	-	83 Unit	83 Unit	100 %	76 Unit	-	-
2.12.01.2.09.0009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	-	-
2.12.02	Program : Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	70 %	-	57 %	56,53%	98,61%	60 %	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.02.2.01	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
2.12.02.2.01.0001	Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	-	-
2.12.02.2.01.0002	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	195000 Dokumen	-	157500 Dokumen	159001 Dokumen	100,95%	165000 Dokumen	-	-
2.12.02.2.02	Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase penataan dokumen pendaftaran penduduk yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.02.2.02.0002	Sub Kegiatan : Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	33800 Dokumen	-	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	24600 Dokumen	-	-
2.12.02.2.03	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
2.12.02.2.03.0005	Sub Kegiatan : Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	-	-
2.12.03	Program : Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	99,584 %	-	99 %	99,58%	100,14 %	99 %	-	-
2.12.03.2.01	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.03.2.01.0001	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	34802 Dokumen	-	32302 Dokumen	42274 Dokumen	130,87%	32802 Dokumen	-	-
2.12.03.2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
2.12.03.2.02.0008	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	-	-
2.12.04	Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Dokumen dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	100 %	-	44 %	50%	113,64 %	56 %	-	-
2.12.04.2.01	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemangku kepentingan yang memanfaatkan dokumen dan data kependudukan melalui kerjasama	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
2.12.04.2.01.0002	Sub Kegiatan : Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	18 Dokumen	-	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	10 Dokumen	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.04.2.03	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
2.12.04.2.03.0005	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	-	-
2.12.04.2.04	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Terealisasi	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
2.12.04.2.04.0003	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2 Laporan	-	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.05	Program : Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang dimanfaatkan	100 %	-	73 %	90,91	124,53	77 %	-	-
2.12.05.2.01	Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase profil kependudukan yang berhasil disusun dalam satu periode (tahun) waktu oleh instansi penyelenggara administrasi kependudukan	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
2.12.05.2.01.0002	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	100 Dokumen	-	120 Dokumen	120 Dokumen	100 %	50 Dokumen	-	-

Sumber: Renstra Tahun 2025-2029 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025

2.3.2 Permasalahan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas.

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Isu terhadap reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

Permasalahan internal merupakan berbagai kendala yang bersumber dari dalam organisasi Disdukcapil sendiri, baik terkait tata kelola, sumber daya, maupun dukungan sarana-prasarana yang tersedia yang menyebabkan **belum optimalnya tertib administrasi kependudukan**. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Rendahnya Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil

Masalah ini ditandai dengan masih belum optimalnya capaian kepemilikan akta kelahiran. Meskipun layanan penerbitan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan telah mencapai 100% bagi penduduk yang melakukan pelaporan, namun cakupan akta kelahiran masih belum memenuhi target. Persentase kepemilikan akta kelahiran baru mencapai 99,81% untuk penduduk usia 0–5 tahun dan 97,23% untuk penduduk usia 0–17 tahun, menunjukkan bahwa proses layanan dan penjangkauan internal masih perlu diperkuat.

2. Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM pelayanan adminduk

Jumlah pegawai yang tersedia saat ini hanya 106 orang untuk melayani penduduk sekitar kurang lebih 1,4 juta jiwa. Kondisi ini jelas tidak proporsional dan menyebabkan tingginya beban kerja pada setiap pegawai, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas layanan administrasi kependudukan. Selain keterbatasan jumlah, kompetensi SDM dalam hal penguasaan teknologi informasi, kemampuan verifikasi data, serta keterampilan pelayanan publik juga masih perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi tuntutan pelayanan yang semakin kompleks dan berbasis digital.

3. Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pelayanan

Berbagai peralatan teknis seperti perangkat perekaman, pencetakan, jaringan, *server*, serta perangkat pendukung database saat ini memerlukan pemeliharaan maupun pembaruan agar mampu menunjang proses pelayanan secara optimal. Selain itu, kebutuhan akan transformasi digital yang terus berkembang belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan fasilitas yang memadai, sehingga modernisasi layanan administrasi kependudukan belum dapat berjalan secara maksimal.

4. Belum optimalnya kualitas data kependudukan

Kerja sama dalam pemanfaatan data antar-perangkat daerah belum berjalan maksimal, karena proses pemberian hak akses dari Ditjen Dukcapil Kemendagri memerlukan waktu yang cukup lama. Kondisi ini menyebabkan data kependudukan belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan lintas sektor.

Selain itu, penyusunan dan pengelolaan Profil Kependudukan Kota juga belum dilakukan secara optimal, mengakibatkan potensi data sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah belum digunakan secara penuh. Di sisi internal, manajemen dan integrasi data masih membutuhkan penguatan agar data yang disajikan lebih akurat, mutakhir, dan dapat diandalkan untuk mendukung pelayanan serta perencanaan yang lebih efektif.

B. Permasalahan Eksternal

Permasalahan eksternal adalah hambatan yang muncul dari faktor-faktor di luar organisasi, terutama yang terkait perilaku masyarakat serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan lain. Adapun permasalahan eksternal tersebut meliputi:

1. Rendahnya kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pemanfaatan data

Perangkat daerah maupun lembaga lain masih belum memanfaatkan data kependudukan secara konsisten dalam proses perencanaan maupun evaluasi program, sehingga potensi data sebagai dasar penyusunan kebijakan belum dimaksimalkan. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga belum berjalan secara optimal, sehingga upaya untuk membangun ekosistem pemanfaatan data yang terpadu dan berkelanjutan belum dapat terwujud dengan baik. Kondisi ini menyebabkan data kependudukan belum memberikan dampak strategis sebagaimana yang diharapkan dalam mendukung pembangunan daerah.

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Adminduk

Masyarakat cenderung melakukan pelaporan atau pembaruan data kependudukan hanya ketika memiliki kebutuhan tertentu, seperti untuk pengurusan bantuan sosial, pendaftaran sekolah, atau akses layanan kesehatan. Pola perilaku ini mencerminkan masih rendahnya literasi administrasi kependudukan, terutama pada kelompok masyarakat di wilayah perbatasan dan pesisir, masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok dengan mobilitas tinggi. Selain itu, kebiasaan menunda pelaporan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, maupun perpindahan turut menghambat kelengkapan dan akurasi data kependudukan yang diperlukan untuk mendukung pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya kerangka hukum yang jelas menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Kebijakan strategis pemerintah mempercepat pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital;
3. Koordinasi yang berkelanjutan dengan pihak stakeholder, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi kekuatan utama dalam mendukung kelancaran pelayanan;
4. Infrastruktur teknologi informasi yang mampu mendukung terwujudnya layanan kependudukan yang terintegrasi melalui SIAK;
5. Tersedianya database kependudukan yang akurat yang dibutuhkan oleh berbagai institusi atau lembaga lain untuk mendukung keputusan dan kebijakan;
6. Komitmen pimpinan yang tinggi mendorong peningkatan kualitas pelayanan prima administrasi kependudukan.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Keterbatasan SDM berkualitas menghambat optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan;
2. Koordinasi internal maupun eksternal yang belum optimal mengurangi efektivitas penanganan layanan kependudukan;
3. Ketergantungan pada sistem digital yang sering mengalami gangguan teknis menghambat kelancaran layanan;
4. Fasilitas pendukung yang terbatas mempersempit jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Minimnya program pelatihan berkelanjutan menyebabkan peningkatan kompetensi SDM tidak konsisten.

2.3.3 Kondisi Lingkungan Dinamis

Untuk pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

- a. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima menjadi tantangan karena menuntut inovasi, efisiensi, dan standar layanan yang tinggi untuk memenuhi harapan publik;
- b. Dinamika perkembangan kehidupan masyarakat menjadi tantangan karena menuntut penyesuaian berkelanjutan dalam penyediaan layanan publik yang relevan dan berkualitas;
- c. Masih terdapat persepsi di kalangan sebagian masyarakat Kota Batam bahwa dokumen pencatatan sipil dan administrasi kependudukan belum menjadi kebutuhan yang mendesak dan penting;
- d. Sebagian masyarakat masih memanfaatkan jasa perantara tidak resmi calo) dalam mengurus layanan administrasi kependudukan yang sebenarnya disediakan secara gratis oleh pemerintah.
- e. Tuntutan terhadap perubahan tata Kelola pelayanan administrasi yang digital dan inovatif terhadap perkembangan masyarakat.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yaitu:

- a. Adanya Kebijakan pemerintah memberikan peluang strategis bagi Disdukcapil Kota Batam untuk mewujudkan pelayanan prima, integritas, dan profesionalisme;
- b. Pemanfaatan teknologi digital membuka peluang menghadirkan layanan online, arsip elektronik, dan aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang memudahkan akses masyarakat;

- c. Kerja sama antar-stakeholder menjadi peluang untuk memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
- d. Pelibatan masyarakat dalam edukasi memberi peluang untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya dokumen kependudukan;
- e. Pengembangan inovasi layanan publik menjadi peluang untuk menjangkau masyarakat lebih luas melalui program jemput bola, layanan komunitas, dan *one stop service*.
- f. Adanya dukungan kerangka hukum yang kuat sebagai landasan dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

2.3.4 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kritikal, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam antara lain:

1. Belum Peningkatan kualitas layanan serta cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Isu strategis pertama yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam adalah tantangan dalam pemerataan cakupan dan ketertiban administrasi kependudukan di seluruh wilayah. Kondisi geografis Batam yang terdiri atas banyak pulau dengan permukiman yang tersebar menyebabkan layanan kependudukan belum sepenuhnya dapat dijangkau secara merata. Akibatnya, sebagian warga terutama yang tinggal di wilayah pelosok atau pulau-pulau kecil mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta-akta pencatatan sipil. Kondisi ini memunculkan kesenjangan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang pada akhirnya berdampak pada terbatasnya akses mereka terhadap berbagai layanan publik lainnya.

2. Peningkatan kerja sama, koordinasi dan kolaborasi antar instansi dalam pengelolaan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Isu strategis kedua berkaitan dengan belum optimalnya kualitas serta integrasi data kependudukan dalam mendukung pembangunan lintas sektor. Meskipun proses pengumpulan data telah berjalan, validitas dan akurasi data kependudukan di Kota Batam masih perlu ditingkatkan. Ketidakakuratan data dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pemerintah, seperti penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga perencanaan tata ruang kota. Selain itu, kurangnya integrasi data antara Disdukcapil dan instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, maupun BPJS mengakibatkan perlunya pemutakhiran data secara berulang, yang berpotensi menimbulkan inefisiensi dan kesalahan. Oleh karena itu, optimalisasi data kependudukan yang berkualitas dan terintegrasi menjadi kunci dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efektif bagi Pemerintah Kota Batam.

3. Peningkatan budaya tertib administrasi terhadap pentingnya dokumen kependudukan

Isu strategis ketiga yang juga krusial adalah masih rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemutakhiran data kependudukan. Banyak warga Batam yang masih abai atau belum memahami pentingnya memperbarui data ketika terjadi perubahan status, seperti pindah alamat, kelahiran, kematian, atau perkawinan. Kondisi ini menyebabkan data yang tercatat di Disdukcapil menjadi tidak sinkron dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Rendahnya kesadaran tersebut tidak hanya menyulitkan Disdukcapil dalam menjaga validitas data, tetapi juga merugikan masyarakat karena ketidakakuratan data dapat menghambat pemenuhan hak-hak sipil serta akses terhadap berbagai layanan publik. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif

diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemutakhiran data secara berkala.

2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *bottom up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *top down* dari kunjungan kerja Wali Kota dan Reses DPRD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjarangan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditentukan usulan prioritas yang dapat diakomodir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Rokumen Renja PD Tahun 2027

No	Pengusul	Usulan	Uraian Pekerjaan	Alamat Lokasi	Status	Volume	Satuan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Program	OPD Tujuan Akhir

Sumber: RKPD Tahun 2027

2.5 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima, responsif, dan membahagiakan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terus melakukan terobosan melalui berbagai inovasi strategis. Inovasi ini dirancang untuk mengatasi kendala geografis, demografis, serta mempercepat pencapaian target kepemilikan dokumen kependudukan yang mendukung dalam pencapaian Prioritas Daerah ke-3 yaitu Penguatan Inklusi Sosial untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Adil. Berikut adalah rincian inovasi yang telah dilaksanakan:

Tabel 2. 6 Pengelompokan Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Inovasi	Jenis	Permasalahan	Manfaat	Outcome	Indikator yang Didukung
1	Prioritas 3: Penguatan Inklusi Sosial untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Adil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jemput Bola Anak Muda Batam (Jeramba)	Non – Digital	Rendahnya tingkat partisipasi dan keterbatasan waktu pelajar atau pemilih pemula (usia 16-17 tahun) untuk datang langsung ke loket pelayanan guna melakukan perekaman KTP-el.	Mendekatkan dan memudahkan layanan perekaman KTP-el langsung di sekolah atau kampus tanpa mengganggu waktu kegiatan belajar mengajar.	Meningkatnya cakupan kepemilikan KTP-el bagi pemilih pemula serta terjaminnya hak sipil dan politik generasi muda secara inklusif.	• Persentase Perekaman KTP-EI Penduduk Wajib KTP-EI • Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2			Perakit (Perekaman Orang Sakit)	Non – Digital	Kelompok masyarakat rentan (sakit keras, lansia, atau penyandang disabilitas) memiliki keterbatasan mobilitas fisik untuk hadir di loket pelayanan Disdukcapil.	Memberikan pelayanan proaktif berupa perekaman data biometrik langsung ke rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau kediaman warga yang bersangkutan.	Terpenuhinya hak identitas hukum bagi kelompok rentan sehingga mempermudah akses mereka terhadap layanan kesehatan dan bantuan sosial pemerintah.	• Persentase Perekaman KTP-EI Penduduk Wajib KTP-EI • Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3			Lade Katam (Layanan Barcode Disdukcapil Batam)	Digital	Kurangnya aksesibilitas informasi yang praktis bagi masyarakat terkait persyaratan, Standar	Mempermudah masyarakat dalam mengakses panduan layanan, persyaratan, dan formulir permohonan secara instan hanya dengan memindai	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap alur pelayanan yang berdampak pada efisiensi waktu antrean dan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Inovasi	Jenis	Permasalahan	Manfaat	Outcome	Indikator yang Didukung
					Operasional Prosedur (SOP), dan alur layanan administrasi kependudukan.	<i>barcode</i> menggunakan gawai.	peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	
4			LAKSE Batam (Layanan Administrasi Kependudukan Secara Elektronik)	Digital	Keterbatasan waktu masyarakat pekerja, antrean fisik di loket, serta rentang kendali geografis yang menghambat proses pengajuan dokumen kependudukan secara konvensional.	Memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan layanan administrasi kependudukan secara mandiri dari mana saja dan kapan saja melalui platform daring.	Terwujudnya sistem pelayanan publik yang modern, transparan, bebas praktik percaloan, dan berdampak pada tingginya angka kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5			Safari IKD (Safari Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital)	Non-Digital	Masih rendahnya literasi digital kependudukan dan tingkat adopsi masyarakat serta pegawai instansi terhadap urgensi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Mempercepat proses aktivasi IKD melalui kunjungan sistematis dan jemput bola ke berbagai instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan ruang publik.	Terakselerasinya target nasional capaian IKD dan terbangunnya ekosistem basis data kependudukan terintegrasi yang mutakhir secara elektronik.	- Persentase Kepemilikan Identitas Digital (IKD) - Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6			GASPOL (Gerakan Aksi Pelayanan On Location)	Non-Digital	Masyarakat di lokasi padat penduduk, kawasan industri, atau permukiman pesisir seringkali	Memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang komprehensif dan terpadu langsung pada satu titik kumpul di	Terbangunnya budaya tertib administrasi kependudukan di tingkat komunitas dan melonjaknya	- Persentase Kepemilikan Identitas Digital (IKD) - Persentase Kepemilikan

No	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Inovasi	Jenis	Permasalahan	Manfaat	Outcome	Indikator yang Didukung
					menunda pembaruan dokumen keluarga karena hambatan mobilitas dan jam kerja.	lingkungan masyarakat (kelurahan/perumahan)	persentase penerbitan akta pencatatan sipil serta kepemilikan KIA	Kartu Identitas Anak - Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan - Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan - Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan - Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak berusia 0-5 tahun - Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak berusia 0-17 tahun
7			KETAPEL (Ke Tempat Anda, Pelayanan Lengkap)	Non-Digital	Kendala geografis, khususnya bagi masyarakat di wilayah <i>hinterland</i> (kepulauan) atau	Membawa seluruh perangkat dan jenis layanan adminduk secara paripurna (lengkap) ke daerah pelosok/kepulauan tanpa	Membawa seluruh perangkat dan jenis layanan adminduk secara paripurna (lengkap) ke daerah pelosok/kepulauan tanpa membebani	- Persentase Kepemilikan Identitas Digital (IKD) - Persentase Kepemilikan

No	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Inovasi	Jenis	Permasalahan	Manfaat	Outcome	Indikator yang Didukung
					area terluar, yang membutuhkan biaya dan waktu tempuh tinggi ke pusat layanan Disdukcapil.	membebani biaya transportasi warga.	biaya transportasi warga.	Kartu Identitas Anak • Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan • Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan • Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan • Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak berusia 0-5 tahun • Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak berusia 0-17 tahun
8			PEKA EMOJI (Penilaian Kinerja Aparatur Pelayanan Disdukcapil)	Non-Digital	Belum adanya instrumen evaluasi <i>front office</i> yang <i>real-time</i> , ringan, dan partisipatif untuk mengukur	Menjadi instrumen umpan balik (<i>feedback</i>) seketika bagi masyarakat untuk menilai tingkat keramahan dan kecepatan petugas	Meningkatnya profesionalisme, integritas, dan budaya pelayanan prima dari aparatur Disdukcapil yang berujung pada	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Inovasi	Jenis	Permasalahan	Manfaat	Outcome	Indikator yang Didukung
					kualitas interaksi petugas dengan pemohon.	layanan melalui simbol visual (emoji).	peningkatan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.	
9			Paket 3 in 1 (Integrasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran) – Si MANIS	Non-Digital	Proses pengurusan dokumen pasca kelahiran yang terfragmentasi seringkali membuat orang tua harus melakukan permohonan berulang kali, sehingga tidak efisien.	Menyederhanakan alur birokrasi dengan menerbitkan tiga dokumen pokok (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga pembaruan, dan Kartu Identitas Anak) secara serentak dalam satu permohonan.	Tingginya tingkat efisiensi pelayanan, kepastian hukum identitas anak sejak dini, dan tercapainya target cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak secara tuntas.	- Persentase Pemangku Kepentingan Yang Aktif memanfaatkan Dokumen dan Informasi Kependudukan - Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak berusia 0-5 tahun - Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak berusia 0-17 tahun
10			Paket 5 in 1 (Integrasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan)	Non-Digital	Pasangan yang baru melaksanakan perkawinan (non-muslim) kerap lalai atau menunda pelaporan ke Disdukcapil, menyebabkan ketidaksesuaian data status	Memberikan lima keluaran sekaligus (Akta Perkawinan, KTP-el Suami-Istri dengan status kawin, KK baru Suami-Istri, serta KK pemecahan orang tua) secara terintegrasi.	Terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum ikatan perkawinan warga negara, serta termutasi data base kependudukan yang valid dan <i>up-to-date</i> .	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan

No	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Inovasi	Jenis	Permasalahan	Manfaat	Outcome	Indikator yang Didukung
					perkawinan di pusat data.			

Sumber: Laporan Inovasi Disdukcapil, 2026

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025-2029. Adapun tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah “**Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi**”.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan;
2. Meningkatnya kepemilikan dokumen yang sah bagi masyarakat Kota Batam;
3. Meningkatnya pendayagunaan dokumen dan penyajian informasi kependudukan yang akurat, mutakhir oleh pemangku kepentingan (stakeholder)

Dalam perumusannya, penetapan target untuk tahun 2027 diarahkan pada tema sentral, yaitu **Perluasan Aksesibilitas dan Inklusivitas Adminduk**. Penetapan arah kebijakan dan fokus pelayanan tahun 2027 tersebut sangat dipengaruhi oleh hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, evaluasi pelaksanaan Renja khususnya capaian kinerja hingga Desember 2025 menjadi instrumen krusial untuk memotret keberhasilan dan kendala lapangan. Secara umum, evaluasi tahun 2025 menunjukkan bahwa *core business* Disdukcapil berkinerja sangat memuaskan dan berbanding lurus dengan upaya pencapaian sasaran "Meningkatnya kepemilikan dokumen yang sah". Capaian indikator Program Pencatatan Sipil (99,58%) dan Pengelolaan Profil Kependudukan (100%) berhasil melampaui target. Keberhasilan ini didorong oleh responsivitas aparatur dalam menghadapi tingginya permintaan dokumen akibat karakteristik Batam sebagai kota industri dengan tingkat migrasi masif, yang dijawab melalui strategi inovasi layanan jemput bola, sinergi lintas sektoral, dan optimalisasi sarana prasarana.

Meskipun demikian, evaluasi tahun 2025 juga mencatatkan beberapa dinamika yang menjadi dasar penyempurnaan target ke depan. Pada Program Pendaftaran Penduduk, capaian persentase terealisasi sebesar 56,53% dari target 57,33%, kendati secara volume riil pencetakan dokumen berhasil melampaui target (159.001 dari 157.500 dokumen) dan capaian pendataan penduduk non-permanen menyentuh angka 100%. Di sisi lain, tingginya volume layanan menuntut prioritas sumber daya manusia dan anggaran pada penyelesaian antrean *front-office*. Hal ini, ditambah dengan adanya *refocusing* anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, berimplikasi pada belum optimalnya beberapa program penunjang *back-office* seperti Bimbingan Teknis, pengawasan SIAK, serta pendidikan dan pelatihan pegawai yang dialihkan ke metode daring.

Oleh karena itu, penyusunan Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2027 didesain untuk menjembatani evaluasi tersebut. Fokus pada **Perluasan Aksesibilitas dan Inklusivitas Adminduk** dirancang agar tidak hanya

mempertahankan volume dan capaian pencetakan dokumen masyarakat secara proaktif, tetapi juga memperbaiki tata kelola *back-office* pasca-transisi Renstra. Dengan menyeimbangkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menekan beban *front-office* dan meningkatkan kapasitas aparatur secara berkesinambungan, target perbaikan kualitas pelayanan pemerintahan, kepemilikan dokumen masyarakat, dan pemanfaatan data kependudukan di Kota Batam dapat direalisasikan secara optimal.

Tabel 3. 1 Target Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2027

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2027
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Poin)	92.18
2		Sasaran 2: Meningkatnya kepemilikan dokumen yang sah bagi masyarakat Kota Batam Indikator: Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Persentase)	80.91%
3		Sasaran 3: Meningkatnya pendayagunaan dokumen dan penyajian informasi kependudukan yang akurat, mutakhir oleh pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) Indikator: Persentase Pemangku Kepentingan Yang Aktif Memanfaatkan Dokumen Dan Informasi Kependudukan (Persentase)	75%

Sumber: Renstra Tahun 2025-2029

3.2 Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045 menggariskan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Penentuan visi ini berlandaskan pada: kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi: **kependudukan**, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; perkembangan megatrend global; dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Tahap pertama dalam kerangka "**Penguatan Transformasi**" akan dilaksanakan melalui pembangunan jangka menengah pada periode 2025-2029. Pembangunan Tahun 2027 berada dalam tahap pertama jangka menengah, sebagaimana diarahkan oleh Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang mengusung visi "*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*". Visi ini diwujudkan melalui Asta Cita, yaitu delapan misi utama yang dirumuskan menjadi 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*).

Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan skenario tren 2020-2050, Indonesia diperkirakan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebesar 269,58 juta jiwa, dan diproyeksikan meningkat menjadi 284,44 juta jiwa pada tahun 2025 serta 295 juta jiwa pada tahun 2029. Saat ini data penduduk yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri menunjukkan proporsi penduduk berada pada angka **286.623.623 jiwa**, meningkat sekitar 1,7 juta jiwa dibandingkan dengan akhir 2024. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar ini, penyelenggaraan **administrasi kependudukan yang tertib, teratur, berkesinambungan, dan modern** menjadi semakin penting baik pada tataran nasional hingga daerah.

Penyusunan Renja Tahun 2027 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah, adapun arah kebijakan pembangunan untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional

Dalam kerangka kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mendukung Misi 1, yaitu *Transformasi Sosial* dengan tujuan *Indonesia Emas Ketiga (IE-3)* melalui perlindungan sosial yang adaptif. Perlindungan Sosial yang Adaptif. Upaya transformasi sosial dalam perlindungan sosial adaptif mencakup implementasi **Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi**, yang diturunkan dalam kerangka Sinkronisasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati dengan langkah-langkah:

- a. Layanan adminduk yang terpadu antar kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah;

Melalui percepatan cakupan administrasi kependudukan, mencakup: Perluasan jangkauan pelayanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri, mencakup: (a) Pendekatan layanan ke tingkat desa dan kelurahan serta layanan di seluruh kantor Perwakilan Republik Indonesia; (b) Peningkatan **pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil** yang mudah dan cepat; (c) Pengembangan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi dan terhubung lintas sektor; dan (d) Keterhubungan antar sistem informasi di berbagai lembaga pemerintah.

- b. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan;

Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mencakup: (a) Pelibatan berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi dan advokasi; dan (b) Pengembangan sistem insentif yang tepat untuk mendorong penduduk dan WNI di luar negeri untuk melaporkan peristiwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- c. Tata kelola data kependudukan yang berkualitas;

- a. Penerapan Sistem SIAK Terpusat

Dalam menghadirkan data kependudukan yang kualitas, sejak tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menerapkan perubahan kebijakan dari Sistem SIAK Terdistribusi kepada Sistem SIAK Terpusat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam termasuk Kabupaten/Kota yang paling awal menerapkan dan menjalankan Sistem SIAK Terpusat.

- b. Masifkan penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) Sebagai langkah transformasi digitalisasi data kependudukan yang berkualitas serta mengurangi penggunaan plastik/blanko dan kertas dalam mendukung komitmen G20 dan menjawab tantangan SDGs (*Sustainable Development Goals*), sejak tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menghadirkan sebuah terobosan dengan menghadirkan IKD (Identitas Kependudukan Digital) dengan mudah di akses melalui Smartphone.
- d. Integrasi sistem administrasi kependudukan dengan sistem layanan publik lainnya, mencakup:
 - a. Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mencakup: (a) Penyediaan statistik hayati yang akurat dari data lintas sektor; dan (b) Pemanfaatan statistik hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
 - b. Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar-kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati, mencakup: (a) Penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang menyeluruh dan selaras antar sektor; dan (b) Penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.
- e. Pemanfaatan data adminduk untuk perencanaan pembangunan

Sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, dengan tema “Akseleras Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri” dengan administrasi kependudukan mendukung **Program Nasional 7**, yaitu *Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan*, melalui kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang selaras dengan reformasi di bidang politik.

2. Prioritas Provinsi

Pada tingkat provinsi, arah pembangunan Kepulauan Riau Tahun 2027 menempatkan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam kerangka menuju pencapaian terhadap misi ke-4 yakni “Melaksanakan Taa Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan” dengan sasaran meningkatkan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Pada tahun 2027 mengusung strategi pengembangan pelayanan publik yang responsif dan berkualitas. Penahapan tahun 2027, Provinsi Kepulauan Riau mengusung tema pengembangan potensi perekonomian daerah dan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter, didukung pelayanan publik yang bermutu. Kerangka tersebut diuraikan melalui 3 prioritas Pembangunan dengan tema Rencana Kerja Provinsi Tahun 2027 mengemban tema “ “Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah, dan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berkarakter, didukung Pelayanan Publik yang Bermutu”, terhadap urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil termasuk dalam prioritas ke 3, yakni **Program Provinsi ke-3**, yaitu *Pengembangan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu*. Fokus program ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga secara vertikal dan horizontal, serta memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi untuk perekaman dan pendataan penduduk.

3. Prioritas Daerah

Dalam rangka mendukung visi Kota Batam sebagai “Batam Kota Madani yang Inovatif Berbudaya dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata”, Disdukcapil mendukung penuh dalam pencapaian tujuan untuk meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi menuju pemerintah daerah yang berdaya saing melalui peningkatan pelayanan publik. Hal yang sama tercermin dalam arah pembangunan Kota Batam Tahun 2027 mengusung tema *Pemantapan Kemandirian Masyarakat dan Keadilan Pembangunan*, urusan administrasi kependudukan menjadi isu *crosscutting* dalam mendukung tema Pembangunan daerah tahun 2027 dengan prioritas ke-3 yaitu **“Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil”**. Dalam upaya menunjang prioritas pembangunan ada tahun 2027, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil didukung melalui *Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil*. Program ini diwujudkan melalui peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi pada bidang pelayanan publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain:

1. Program Pendaftaran Penduduk, meliputi perekaman KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA) dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD);
2. Program Pencatatan Sipil, meliputi Akta Kelahiran penduduk berusia 0-5 tahun, Akta Kelahiran Penduduk berusia 0-17 tahun, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian yang dilaporkan penduduk.
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, meliputi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
4. Program Pengelolaan Profil, meliputi ketersediaan data konsolidasi berskala Kota dan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Batam.

Program diatas diterjemahkan dalam kegiatan pelayanan teknis dengan memperhatikan fokus arah kebijakan pelayanan publik antara lain:

1. Penyediaan data kependudukan secara tersentral (online);
2. Pemerintah daerah Provinsi dan Kab/Kota harus menyelenggarakan kegiatan yang mendukung suksesnya gerakan indonesia adminduk (GISA) bertajuk Dukcapil Prima;
3. Pemerintah Kab/Kota menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang adminduk,
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adminduk,
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan adminduk melalui inovasi,
4. Fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kab/Kota dengan OPD lain untuk pemanfaatan database kependudukan;
5. Mendorong daerah untuk optimalisasi penerapan pelayanan berbasis digital;
6. Jemput Bola di beberapa wilayah yang penduduk yang masih banyak belum melakukan perekaman termasuk membuka pelayanan perekaman KTP el di berbagai event tingkat daerah maupun regional;
7. Optimalisasi jam pelayanan di luar jam kerja kantor.
8. Pelaksanaan pelayanan pada hari libur sabtu minggu dan/atau hari libur nasional sesuai dengan ketentuan;
9. Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan (MoU dan PKS);
10. Konfigurasi jaringan dan database Kependudukan dalam rangka pemanfaatan data tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peningkatan kualitas pelayanan dan penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Anak Usia 0 s.d 24 Bulan;

12.Melaksanakan Kerjasama dengan OPD terkait/mitra untuk meningkatkan cakupan Akta Pencatatan Sipil;

Yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan undang-undang yang berlaku lainnya. Berdasarkan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam secara spesifik sudah mengintegrasikan sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2027 yang mengangkat tema “**Perluasan Aksesibilitas dan Inklusivitas Adminduk**”, Disdukcapil mengarahkan kegiatan untuk mendukung optimalisasi tata kelila pemerintahan berbasis digital dan meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel serta kolaborasi antar instansi dalam rangka kesinambungan pelayanan. Disdukcapil menentukan arah kebijakan yang akan diimplementasikan dalam kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan dan manajemen sumberdaya;
2. Digitalisasi layanan administrasi kependudukan;
3. Integrasi pelayanan administrasi kependudukan;
4. Pelayanan PRIMA berbasis standar pelayanan minimum untuk kelompok inklusi / rentan dan berbasis penguatan gender;
5. Implementasi inovasi pelayanan berbasis teknologi yang berkelanjutan;
6. Peningkatan kualitas Kerjasama pemanfaatan kependudukan
7. Pengembangan profil kependudukan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah termasuk penguatan *roadmap* pembangunan kependudukan.

Tabel 3. 2 Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau, Prioritas Kota Batam dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2027

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota Batam	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PP 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	P3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	1. Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan dan manajemen sumberdaya; 2. Digitalisasi layanan administrasi kependudukan; 3. Integrasi pelayanan administrasi kependudukan; 4. Pelayanan PRIMA berbasis standar pelayanan minimum untuk kelompok inklusi / rentan dan berbasis

			penguatan gender; 5. Implementasi inovasi pelayanan berbasis teknologi yang berkelanjutan; 6. Peningkatan kualitas Kerjasama pemanfaatan kependudukan 7. Pengembangan profil kependudukan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah termasuk penguatan <i>roadmap</i> pembangunan kependudukan.
--	--	--	---

Sumber: RKPD Tahun 2027 dan Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada perencanaan Tahun 2027 merupakan tahun ke-3 dalam Renstra Tahun 2025-2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk Tahun 2027 melaksanakan 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan dengan 30 (tiga puluh) jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji pada masing-masing sub bagian.

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2027

Rincian usulan program dan pagu indikatif yang tergambar pada tabel di bawah akan menjadi pedoman utama sekaligus dasar pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun Anggaran 2027.

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2027

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukung an	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungj awab
								Target 2027	Pagu Indikati f	Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas					Targ et	Pagu Indikati f	
												Nasion al	Provins i	Daerah					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			23.376.073.105								27.008.485.976			
2	1 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			23.376.073.105								27.008.485.976			
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			23.376.073.105								27.008.485.976			
2	1 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP PD	78.61	74.61 Nilai	20.447.541.405							76.61	22.359.900.655	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
						Indeks Pelayanan Keseekretariat an PD	100	98 Nilai								99		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2	1 2	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran , dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu		100 Persenta se	9.378.000							100	11.040.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2	1 2	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	5.210.000	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu		PEMERINT AH DAERAH	2	5.520.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukung an	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungj awab	
								Target 2027	Pagu Indikati f	Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikati f		
												Nasion al	Provins i						Daerah
											Asasi Manusia;		nan yang berkelanju tan dan adil						
2	1 2	0 1	2.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	4.168.000	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil		PEMERINT AH DAERAH	3	5.520.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	1 2	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		100 Persenta se	18.003.015. 417							100	18.454.129. 801	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2	1 2	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		106 Orang/bu lan	17.953.375. 417	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil		PEMERINT AH DAERAH	105	18.402.209. 801	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	1 2	0 1	2.0 2	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi		13 Dokumen	49.640.000	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi		PEMERINT AH DAERAH	12	51.920.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukung an	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungj awab	
								Target 2027	Pagu Indikati f	Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas							
												Nasion al	Provins i			Daerah			
						Pelaksanaan Tugas ASN						Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil					
2	1 2	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensin ya		100 Persenta se	126.672.00 0						100	142.520.00 0	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
2	1 2	0 1	2.0 5	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	77.592.000	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil		PEMERINT AH DAERAH	1	85.260.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	1 2	0 1	2.0 5	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6 Orang	49.080.000	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil		PEMERINT AH DAERAH	7	57.260.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukung an	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungj awab	
								Target 2027	Pagu Indikati f	Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas							
												Nasion al	Provins i			Daerah			
2	1 2	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100 Persenta se	338.872.30 0						100	303.341.00 0	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
2	1 2	0 1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	23.418.100	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil		PEMERINT AH DAERAH	1	19.792.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	1 2	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	108.198.200	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil		PEMERINT AH DAERAH	4	96.242.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	1 2	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	15.507.800	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu		PEMERINT AH DAERAH	1	10.536.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukung an	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungj awab	
								Target 2027	Pagu Indikati f	Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikati f		
												Nasion al	Provins i						Daerah
											Asasi Manusia;		nan yang berkelanju tan dan adil						
2	1 2	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	17.371.200	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil		PEMERINT AH DAERAH	1	13.335.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	1 2	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	174.377.000	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil		PEMERINT AH DAERAH	12	163.436.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	1 2	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100 Persenta se	630.175.30 0								100	1.567.543.4 00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	1 2	0 1	2.0 7	000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		8 Unit	53.271.600	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan		PEMERINT AH DAERAH	21	72.923.400	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukung an	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungj awab	
								Target 2027	Pagu Indikati f	Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikati f		
												Nasion al	Provins i						Daerah
											koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil						
2	1 2	0 1	2.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		30 Unit	576.903.700	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil		PEMERINT AH DAERAH	32	1.494.620.0 00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	1 2	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100 Persenta se	991.898.38 8							100	1.410.610.0 79	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2	1 2	0 1	2.0 8	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	56.700.000	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju		PEMERINT AH DAERAH	1	43.200.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukung an	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungj awab
								Target 2027	Pagu Indikati f	Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas					Targ et	Pagu Indikati f	
												Nasion al	Provins i	Daerah					
														tan dan adil					
2	1 2	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan	549.795.600	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil	PEMERINT AH DAERAH	4	1.030.750.0 79	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2	1 2	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Laporan	385.402.788	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil	PEMERINT AH DAERAH	2	336.660.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2	1 2	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100 Persenta se	347.530.00 0								100	470.716.37 5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	1 2	0 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan		1 Unit	44.140.000	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi	PEMERINT AH DAERAH	1	40.380.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukung an	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungj awab	
								Target 2027	Pagu Indikati f	Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikati f		
												Nasion al	Provins i						Daerah
					dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil					
2	1 2	0 1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 Unit	195.950.000	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil	PEMERINT AH DAERAH	5	213.209.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2	1 2	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		145 Unit	107.440.000	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil	PEMERINT AH DAERAH	115	217.127.375	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2	1 2	0 2			PROGRAM PENDAFTARA N PENDUDUK	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran	67.67	62.33 Persenta se	2.360.199.9 00							65.00	4.263.575.3 21	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukung an	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungj awab
								Target 2027	Pagu Indikati f	Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas						
												Nasion al	Provins i			Daerah		
						penduduk yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan												
2	1 2	0 2	2.0 1		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan		100 Persenta se	1.896.104.3 00							100	3.840.542.3 21	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	1 2	0 2	2.0 1	000 1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependuduka n		12 Dokumen	5.520.000	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		Pemerint ah Daerah	12	10.992.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2	1 2	0 2	2.0 1	000 2	Pencatatan, Penatausaha an dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausaha an dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		172500 Dokumen	1.890.584.3 00	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		Pemerint ah Daerah	18000 0	3.829.550.3 21	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukung an	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungj awab	
								Target 2027	Pagu Indikati f	Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikati f		
												Nasion al	Provins i						Daerah
													tan dan adil						
2	1 2	0 2	2.0 2		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase penataan dokumen pendaftaran penduduk yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan peundang- undangan		100 Persenta se	378.589.60 0							100	407.196.00 0	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2	1 2	0 2	2.0 2	000 2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependuduka n selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		26900 Dokumen	378.589.600	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahana n Keamanan Negara dan Mendoron g Kemandiri an Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhati kan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentas an kemiskina n dan perlindung an sosial adaptif integratif	- Kemiskinan	PEMERINT AH DAERAH	29200	407.196.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukung an	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungj awab	
								Target 2027	Pagu Indikati f	Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikati f		
												Nasion al	Provins i						Daerah
2	1 2	0 2	2.0 3		Penyelenggara an Pendaftaran Penduduk	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelengara an Pendaftaran Penduduk.		100 Persenta se	85.506.000						100	15.837.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
2	1 2	0 2	2.0 3	000 5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk		1 Laporan	85.506.000	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil	PEMERINT AH DAERAH	1	15.837.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2	1 2	0 3			PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan	99.56	99.49 Persenta se	470.084.60 0						99.52	276.874.00 0	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
2	1 2	0 3	2.0 1		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan		100 Persenta se	238.159.00 0						100	225.716.00 0	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukung an	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungj awab	
								Target 2027	Pagu Indikati f	Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikati f		
												Nasion al	Provins i						Daerah
2	1	0	2.0	000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		33302 Dokumen	238.159.000	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil	PEMERINT AH DAERAH	33802	225.716.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2	1	0	2.0		Penyelenggara an Pencatatan Sipil	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggar aan Pencatatan Sipil		100 Persenta se	231.925.60 0							100	51.158.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2	1	0	2.0	000	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil		1 Laporan	231.925.600	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil	PEMERINT AH DAERAH	1	51.158.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAA N INFORMASI ADMINISTRAS I KEPENDUDUK AN	Persentase Dokumen dan Informasi Kependuduka n yang dimanfaatkan	89	67 Persenta se	24.932.200							78	46.024.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukung an	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungj awab	
								Target 2027	Pagu Indikati f	Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikati f		
												Nasion al	Provins i						Daerah
2	1	0	2.0		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemangku kepentingan yang memanfaatka n dokumen dan data kependuduka n melalui melakukan kerjasama		100 Persenta se	6.348.000						100	18.580.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
2	1	0	2.0	000	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependuduka n		12 Dokumen	6.348.000	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil	- Kemiskinan	PEMERINT AH DAERAH	14	18.580.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	1	0	2.0		Penyelenggara an Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggar aan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n		100 Persenta se	11.592.000						100	11.604.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
2	1	0	2.0	000	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi		1 Laporan	11.592.000	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila,		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk	PEMERINT AH DAERAH	1	11.604.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukung an	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungj awab	
								Target 2027	Pagu Indikati f	Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikati f		
												Nasion al	Provins i						Daerah
						Kependuduka n						Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil					
2	1 2	0 4	2.0 4		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n yang Terealisasi		100 Persenta se	6.992.200						100	15.840.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
2	1 2	0 4	2.0 4	000 3	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n dan Pendayagunaa n Data Kependuduka n		1 Laporan	6.992.200	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperko koh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudk an pembangu nan yang berkelanju tan dan adil		PEMERINT AH DAERAH	2	15.840.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	1 2	0 5			PROGRAM PENGELOLAA N PROFIL KEPENDUDUK AN	Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka n yang dimanfaatkan	98	84 Persenta se	73.315.000						91	62.112.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukung an	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungj awab	
								Target 2027	Pagu Indikati f	Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikati f		
												Nasion al	Provins i						Daerah
2	1	0	2.0		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase profil kependuduka n yang berhasil disusun dalam satu periode (tahun) waktu oleh instansi penyelenggar a administrasi kependuduka n		100 Persenta se	73.315.000						100	62.112.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
2	1	0	2.0	000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependuduka n serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun		100 Dokumen	73.315.000	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahana n Keamanan Negara dan Mendoron g Kemandiri an Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhati kan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentas an kemiskina n dan perlindung an sosial adaptif integratif	- Kemiskinan	PEMERINT AH DAERAH	100	62.112.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukung an	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungj awab
				Target 2027	Pagu Indikati f	Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas					Targ et	Pagu Indikati f	
								Nasion al	Provins i	Daerah					
TOTAL:						23.376.073.105		27.008.485.976							

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Pencapaian Program Prioritas Daerah, Kontirbusi terhadap Pencapaian Nasional, Pencapaian SPM (Bagi Bidang Urusan Terkait) dan Tematik Lainnya sesuai dengan Bidang Urusan.

Penyusunan Rencana Kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan dan keselarasan antaran dokumen perencanaan, Pembangunan baik secara vertikal dan horisontal. Keselarasan program ini juga diwujudkan melalui dukungan program terhadap: i) Prioritas Nasional; ii) Prioritas Provinsi; iii) Prioritas Daerah, iv) Terhadap Aspek Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dan v) Pengarusutamaan Gender

4.2.1 Keterkaitan Rencana Kerja dengan Prioritas Nasional

Dalam kerangka makro pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 dan akselerasi ekonomi pada tahun 2027, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam memainkan peran strategis secara tidak langsung sebagai fondasi dasar bagi pencapaian delapan prioritas nasional (Asta Cita). Meskipun instansi ini tidak bersinggungan langsung dengan sektor investasi dan industrialisasi secara teknis, kepastian identitas hukum dan ketersediaan basis data kependudukan yang terintegrasi merupakan prasyarat mutlak (*enabler*) bagi keberhasilan program prioritas tersebut. Data demografi yang valid dan mutakhir menjadi basis utama bagi kemudahan verifikasi perizinan usaha, pemetaan angkatan kerja untuk mendukung produktivitas industri, hingga ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan dan bantuan sosial. Melalui pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif dan berbasis digital, Disdukcapil Kota Batam turut menciptakan efisiensi birokrasi yang mendukung iklim investasi sehat, sehingga secara agregat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Tabel 4. 2 Dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Dukungan Program RKPD Kota Batam Tahun 2027	Pagu 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	PN.7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.447.541.405	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Sumber: RKPD Tahun 2027

4.2.2 Keterkaitan Rencana Kerja dengan Prioritas Provinsi

Prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Sebagai bagian integral dari wilayah provinsi, Kota Batam perlu menyelaraskan arah dan fokus pembangunannya agar selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi. Oleh karena itu, keterkaitan antara prioritas pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2027 dengan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menjadi hal yang krusial untuk memastikan sinergi kebijakan, konsistensi perencanaan, serta efektivitas pencapaian tujuan pembangunan secara regional. Dalam konteks tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mengambil peran strategis sebagai fondasi utama pembangunan melalui penyediaan data kependudukan yang akurat dan pelayanan administrasi yang inklusif. Rencana Kerja Disdukcapil Kota Batam disusun untuk mengintervensi langsung prioritas regional, khususnya dalam mendukung pilar penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis akurasi data perlindungan sipil

Tabel 4. 3 Dukungan Program Rencana Kerja terhadap Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2027	Dukungan Program Rencana Kerja Disdukcapil Tahun 2027
Prioritas 3 Pengembangan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu	1. Program Pendaftaran Penduduk
	2. Program Pencatatan Sipil
	3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Sumber: RKPD Tahun 2027

4.2.3 Keterkaitan Rencana Kerja dengan Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Sebagai bagian integral dari wilayah provinsi, Kota Batam perlu menyelaraskan arah dan fokus pembangunannya agar selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi. Oleh karena itu, keterkaitan antara prioritas pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2027 dengan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menjadi hal yang krusial untuk memastikan sinergi kebijakan, konsistensi perencanaan, serta efektivitas pencapaian tujuan pembangunan secara regional. Dalam konteks tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mengambil peran strategis sebagai fondasi utama pembangunan melalui penyediaan data kependudukan yang akurat dan pelayanan administrasi yang inklusif. Rencana Kerja Disdukcapil Kota Batam disusun untuk mengintervensi langsung prioritas regional, khususnya dalam mendukung pilar penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis akurasi data perlindungan sipil

Tabel 4. 4 Dukungan Program Rencana Kerja terhadap Prioritas Kota Batam Tahun 2027

Misi Kota Batam	Sasaran Daerah	Dukungan Program Rencana Kerja Disdukcapil Tahun 2027
Misi ke -4 Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi menuju pemerintah daerah yang berdaya saing	Meningkatnya pelayanan publik	1. Program Pendaftaran Penduduk
		2. Program Pencatatan Sipil
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah	3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber: RKPD Tahun 2027

4.2.4 Keterkaitan Rencana Kerja dengan Dukungan Terhadap Aspek Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka pengentasan kemiskinan ekstrem mengusung strategi antara lain (1) pengurangan beban pengeluaran, (2) peningkatan pendapatan, dan (3) meminimalkan kantong kemiskinan. Berdasarkan hal diatas terhadap dukungan Program RKPD terhadap Optimal Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan antara lain:

Tabel 4. 5 Dukungan Program Rencana Kerja terhadap Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan

No	Perangkat Daerah/Pelaksana	Tujuan Program/Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD 2027	
								Kinerja	Pagu Renja
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam								458,252,600
			2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk					378,589,600
			2.12.02.2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk				378,589,600
		Mengurangi Beban Pengeluaran				Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dengan Satuan: Dokumen)	26.900	378,589,600
			2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					6,348,000
		Mengurangi Beban Pengeluaran	2.12.04.2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				6,348,000
						Kerja Pemanfaatan Data Kependudukan Sama	Jumlah Dokumen Kerja Pemanfaatan Data Kependudukan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	6,348,000
			2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan					73,315,000
			2.12.05.2.01		Penyusunan Profil Kependudukan				73,315,000

		Mengurangi Beban Pengeluaran				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dengan Satuan: Dokumen)	100	73,315,000
--	--	------------------------------------	--	--	--	---	--	-----	------------

Sumber: RKPD Tahun 2027

4.2.5 Keterkaitan Rencana Kerja dengan Pengarusutamaan Gender

Pemerintah Kota Batam berkomitmen penuh untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui pengintegrasian strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah. Sejalan dengan komitmen tersebut, Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam disusun dengan memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan memuat perspektif gender. Keterkaitan Renja dengan PUG bukan hanya sekadar pemenuhan mandat regulasi, melainkan upaya sistematis untuk memastikan bahwa laki-laki, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya memiliki kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang prima dan tanpa diskriminasi.

Tabel 4. 6 Dukungan Program Rencana Kerja terhadap Pengarusutamaan Gender Tahun 2027

Tujuan	Program
Pengarusutamaan Gender	1. Program Pendaftaran Penduduk
	2. Program Pencatatan Sipil

Sumber: RKPD Tahun 2027

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keberhasilan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat diukur melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah. Indikator-indikator ini disesuaikan dengan bidang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Batam. Sebagai penjabaran teknis untuk mencapai target pembangunan Pemerintah Kota Batam pada tahun 2027 tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menetapkan sasaran kinerjanya secara spesifik pada urusan administrasi kependudukan. Capaian indikator kinerja pada lokus Disdukcapil inilah yang nantinya akan berkontribusi langsung terhadap keberhasilan target kinerja makro daerah.

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran utama dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan. IKU berfungsi sebagai indikator capaian akhir atau tujuan pembangunan daerah, yang mencerminkan dampak nyata dari kebijakan dan program yang telah dilaksanakan.

Tabel 5. 1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027	Target Akhir 2030
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Indeks	3.64	3.74	3.79
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	93.01	92.18	92.25
1.2	Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase	78.06	80.91	84.79
1.3	Persentase Pemangku Kepentingan Yang Aktif Memanfaatkan Dokumen Dan Informasi Kependudukan	Persentase	70.45	75.00	100

Sumber : Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Berbeda dengan IKU, Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan tolok ukur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang lebih teknis, spesifik, dan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau target sektoral. IKK diturunkan dari IKU untuk memantau kinerja operasional (*output dan outcome*

spesifik). IKK pada Disdukcapil Kota Batam diklasifikasikan ke dalam tiga rumpun layanan pokok, yaitu:

Tabel 5. 2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase	100	100
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase	100	100
3	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase	100	100
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	Persentase	98.20	97.60
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	63.35	73.00
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	Persentase	100	100
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persentase	6.04	14

Sumber: Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada Tahun 2027 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2027 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.

6.1 Catatan Penting

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam 2027 dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2027, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2027 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2027 terdiri atas 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan dengan 30 (tiga puluh) jenis sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2027, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2027.

6.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025-2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2027 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah).
2. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2027 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2027 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2027).

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2027 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD

WELCOME TO BATAM



PROFESIONAL
RESPONSIF
INOVATIF
MELAYANI
AKUNTABEL



IKD IS
IDENTITAS
KEPENDUDUKAN
DIGITAL

INDONESIA'S
FUTURE